



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 271 TAHUN 2023
TENTANG
RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN UNTUK
KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE PERTAMA MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN UNTUK KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE PERTAMA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun Anggaran 2023 periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah).

- KEDUA : Rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun Anggaran 2023 periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 271 TAHUN 2023
 TENTANG
 RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN
 BERJALAN UNTUK KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM
 RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA TAHUN
 ANGGARAN 2023 PERIODE PERTAMA MENURUT
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

**RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN UNTUK
 KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN
 INFLASI DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE PERTAMA
 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

(dalam ribuan rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
1.	Kab. Aceh Barat	9.532.909
2.	Kab. Aceh Besar	9.597.631
3.	Kab. Aceh Selatan	9.589.276
4.	Kota Langsa	10.844.657
5.	Kab. Gayo Lues	9.506.496
6.	Kota Gunungsitoli	8.982.661
7.	Kota Payakumbuh	9.138.406
8.	Kab. Indragiri Hilir	9.492.022
9.	Kota Dumai	10.353.065
10.	Kab. Bungo	9.565.349
11.	Kab. Merangin	10.820.277
12.	Kab. Banyuasin	9.454.033
13.	Kab. Ogan Ilir	9.591.545
14.	Kab. Bengkulu Utara	9.680.149
15.	Provinsi DKI Jakarta	11.677.376
16.	Kab. Bekasi	10.015.718
17.	Kab. Garut	10.634.802
18.	Kab. Pangandaran	11.081.589
19.	Kab. Jepara	9.664.190
20.	Kab. Sleman	10.021.848
21.	Kab. Banyuwangi	12.290.240
22.	Kab. Sintang	9.560.837
23.	Kab. Kayong Utara	9.943.767
24.	Provinsi Kalimantan Tengah	9.340.027
25.	Kab. Sukamara	10.019.416
26.	Kota Bitung	11.677.460

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
27.	Kab. Minahasa Selatan	9.980.079
28.	Kab. Halmahera Timur	10.275.276
29.	Kab. Halmahera Selatan	9.480.979
30.	Kota Serang	9.003.751
31.	Kab. Bangka Tengah	10.310.410
32.	Provinsi Gorontalo	8.982.597
33.	Kab. Pohuwato	9.891.162
JUMLAH PROVINSI		30.000.000
JUMLAH KABUPATEN/KOTA		300.000.000
JUMLAH NASIONAL		330.000.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI